

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Meyke Prameswari

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Teluk Kuantan

Email: meykeprameswari2018@gmail.com

ABSTRACT

This background research is of Accrual Accounting Governance Standard of them is information technology, information technology at Local Government Kuantan Singingi Regency have is adequate. Formulating this research internal issue is do Implementation of Accrual Accounting Governance Standard at Government Kuantan Singingi have as according to Regulation of Government of No. 71 Year 2010 about Standard Accountancy Governance?. Result of research is Implementation of Accrual Accounting Governance Standard at Government Kuantan Singingi have as according to Regulation of Government of No. 71 Year 2010 about Standard Accountancy Governance where Financial Statement Local Government Kuantan Singingi Regency have presented 7 financial statement component that is: Report Realize Budget, Statement of Changes in Balance More, Balance, Report Operational, Cash flow statement, Statement Of Changes In Ekuitas and Note of Financial Statement .

Keyword: The Implementation Of Accrual Accounting Governance Standard, The Government Of Kuantan Singingi, Regulation of Government of No. 71 Year 2010

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual salah satunya adalah teknologi informasi, teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah memadai. Rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?. Hasil Penelitian adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dengan terbitnya SAP ini semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual, (PP No. 71 Tahun 2010).

Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh suatu entitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui/dicatat dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Secara umum terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Namun dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, dikenal basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi yang mengakui transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat dan menyajikan

transaksi ekonomi serta peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode (Suryo Adiprojo, 2015).

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena merupakan tahun awal dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual. Dengan adanya wewenang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Yanti Muharni Yulis, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan komponen laporan keuangan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1 Rumusan Masalah

apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

1.2 Tujuan Penelitian

Mengetahui kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, “standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

- a. Menurut Faradillah (2013: 8) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Menurut Wijaya (2008: 12), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia.
- c. Menurut Sinaga (2005: 8) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif komparatif. deskriptif adalah membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Sedangkan komparatif merupakan penelitian yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat penelitian sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catata atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) apakah telah sesuai.

3.2 Tehnik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relewan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2008: 163).
- b. Observasi Adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008: 162).
- c. Wawancara Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2008: 162).

3.3 Metode Analisis

- 3.3.1 Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2009: 8).
- 3.3.2 Metode komparatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut (Sugiyono, 2009: 8).

- 3.3.3 Menganalisis hasil wawancara dari 5 (Lima) narasumber untuk mengakses atau memperkuat kesimpulan terkait hasil penelitian tentang belum / sudah sesuai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Singkat OPD Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah otonom adalah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembar Negara tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 3968), dengan Ibukota Teluk Kuantan.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi.

Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

4.2 Hasil Penelitian

NNo	Unsur	PP 71	LKPD	Sesuai/ Belum
1	Penyajian Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	PSAP 02 paragraf 8 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Sesuai
2.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	PSAP Paragraf 41-42 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; b. Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; c. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; d. dan Lain-lain; e. Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; b. Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; c. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; d. dan Lain-lain; e. Saldo Anggaran Lebih Akhir. Dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	Sesuai

3	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Neraca	PSAP 03 paragraf 49 Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas.	Neraca mencantumkan sekurangkurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; aset lainnya kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas.	Sesuai
4	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Operasional (LO)	PSAP 03 paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	Laporan Neraca menyajikan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	Sesuai
5	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Arus Kas (LAK)	PSAP 03 paragraf 15 Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode.	Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.	Sesuai
6	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	PSAP Paragraf 101-102 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara	Sesuai

		<p>ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 3. Ekuitas akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 	<p>lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. <p>d. Ekuitas akhir. Dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	
7	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	<p>PSAP 04 Paragraf 13 Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh</p>	<p>Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan PSAP 04 Paragraf 13 meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah</p>	Sesuai

		Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.	penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
--	--	--	--

Sumber: Hasil analisa Data, 2019

4.3 Pembahasan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal

laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dan Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maka berikut ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2 Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu melakukan perubahan dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode Perpetual, agar bias meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karang anyar karena saat ini menggunakan metode fisik.
- b. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlunya perekrutan pegawai yang memiliki keahlian dibidang akuntansi daerah untuk mengelola Bagian Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana dengan baik.
- c. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memberikan bimbingan teknis lanjutan kepada bendahara OPD agar tidak lagi terjadi kesalahan penginputan sehingga tidak membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi terkendala dalam penyusunannya akibat banyaknya kesalahan pencatatan awal di OPD.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak ZulAmmar, SE., ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi,

3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Diskhamarzaweny, SE., MMselakuPembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. BapakYul Emri Yulis, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banya kmembantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu yang berada pada seluruh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai responden, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi.
8. Teristimewah untuk keluarga penulis Ayahanda Tursetyo Puji Raharjadan Almarhumah Ibunda Juslimar serta Suami Tercinta Sudarmadi, S.Pd dan Ananda terkasih Gempita Putri Madinah yang telah banyak memberikan bantuan baik mori lmaupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung*.
- Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asnawi dan Wijaya. 2008. *Metodologi Penelitian Keuangan, Prosedur, Ide dan Kontrol*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arliana. 2011. *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara*
- Ayu. 2014. *Analisis Penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*.
- Dearlina. Sinaga. 2005. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Andi. Yogyakarta.
- Damayanti. 2012. *Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009*.
- Damanik. 2011. *faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada pemerintah Kota Binjai*.
- Faradillah. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Firdaus. 2015. *Evaluasi Penerapan PP No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*:

- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
<http://fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar.akuntansi.pemerintahan/.S>
 akses tanggal 12 Januari 2019.
- Indra, Bastian. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Manangkalangi. 2013. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Nur Indriantoro dkk. 1999. hal. 146-147). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta.
- Ningtyas. 2015. *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*.
- Paula. 2016. *Penyajian Laporan keuangan Daerah Sesuai Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulut*.
- Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi "Konsep & Tehnik Penyusunan LK*. Jakarta: Erlangga.
- Ritonga. Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Sekolah PAsca Sarja UGM. Yogyakarta.
- Rintiani. 2014. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*.
- Rahayu. 2014. *Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual di Jombang*.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sulani. 2010. *faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 tahun 2005*.

